

Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di Desa Susukan Kabupaten Cirebon

Widyapuri Prasastiningtyas

Widyapuri Prasastiningtyas

Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Komunikasi dan Administrasi
Universitas Sangga Buana
widyapuri_prasastiningtyas@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kebijakan gerakan literasi sekolah di Desa Susukan Kabupaten Cirebon, implementasi berdasarkan 4 isu pokok Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, komitmen, dan struktur birokrasi serta akan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan gerakan literasi.

Desa Susukan memiliki komitmen dalam membangun literasi masyarakat melalui implementasi kebijakan gerakan literasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; (1) implementasi kebijakan gerakan literasi masyarakat; (2) Minat baca masyarakat ; (3) Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di Desa Susukan Kabupaten Cirebon; dan (4) Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di Desa Susukan Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2017 hingga November 2017. Subjek penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat desa susukan kabupaten Cirebon. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Implementasi kebijakan gerakan literasi masyarakat dengan membaca buku pada hari senin, selasa dan rabu pagi, dan sumbang buku ; (2) Minat baca masyarakat Desa Susukan Kabupaten Cirebon masih bergantung pada suasana hati ; (3) Faktor penghambat yaitu perpustakaan kurang diminati masyarakat.

Kata Kunci: *Gerakan Literasi Sekolah, Minat Baca .*

Pendahuluan

Negara Indonesia menempati urutan bawah dalam literasi dunia. Hal ini disebabkan karena budaya literasi masyarakatnya masih sangat rendah. Sejak 16 tahun silam, Indonesia telah ikut dalam proyek penelitian dunia untuk mengukur literasi membaca, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Dari proyek penelitian dunia tersebut, terbukti memang Indonesia merupakan negara yang kurang daya bacanya dalam *literacy purpose*. Kebanyakan orang Indonesia membaca atas dasar *information purpose* (Aulia, 2014). Literasi adalah kemampuan hidup (*life skill*). Oleh karena itu, literasi merupakan kebutuhan hidup masyarakat maju. Tentu saja rendahnya literasi seseorang menghambat kemajuan hidup suatu bangsa.

Peran literasi di dunia pendidikan juga sangat besar. Semakin tinggi tingkat literasi pelajar maka akan semakin tinggi pula tingkat mutu pendidikannya. Hal ini terlihat dari perbedaan siswa yang di dalam kelasnya hanya mendapatkan pembelajaran lewat metode ceramah dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran melalui metode *problem solving*, diskusi atau praktik langsung. Kemampuan literasi dalam hal ini dapat diartikan juga sebagai proses membaca. Membaca yang dimaksud adalah membaca dalam konteks yang sangat luas yaitu *iqra'*.

Membaca untuk memahami, membaca untuk menganalisis lingkungan dan masalah sekitar untuk kemudian dapat digunakan sebagai bahan untuk memecahkan sebuah masalah kehidupan. Hal ini juga dipertegas dengan sabda Rasulullah SAW: "Siapa saja yang menginginkan sukses di dunia, maka raihlah dengan ilmu."

Melihat kenyataan yang ada bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi yang masih rendah maka diperlukan

sebuah perubahan. Perubahan di sini dapat kita mulai dari dimensi pendidikan. Seperti dengan membangun budaya literasi di sekolah-sekolah yang ada di negeri ini. Misalnya dengan membiasakan anak-anak didik terampil membaca setiap harinya hingga memasukkan literasi karakter ke dalam kurikulum tersembunyi sebuah sekolah.

Pendidikan yang berkualitas menjadi kebutuhan penting di era persaingan global yang kian kompetitif. Para pengambil kebijakan di tingkat pusat pastinya sudah menyadari akan hal tersebut. Untuk menjadikan dunia pendidikan berkualitas, tentu sangat banyak faktor yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Salah satu upaya pemerintah menjadikan pendidikan berkualitas adalah melalui meningkatkan budaya literasi (membaca dan menulis).

Pemerintah melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 telah menyadari pentingnya penumbuhan karakter peserta didik melalui kebijakan membaca selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Namun untuk menyukseskan rencana besar ini, tidak bisa instant dan bersifat *temporary*. Yang akan dibangun itu adalah kebiasaan, maka dibutuhkan suatu pembiasaan yang harus terus menerus dilakukan sejak usia dini dan untuk itu konsistensi sangat diperlukan.

Semua elemen bangsa ini harus menyadari bahwa budaya baca-tulis bangsa kita saat ini sangat rendah. Sejak era kecanggihan teknologi saat ini, maka hal yang menjadi daya tarik bagi anak-anak kita bukanlah lagi buku, namun gawai, dan televisi. Coba saja lihat di rumah kita dan lingkungan sekitar. Anak-anak merunduk bermain game atau aktif di dunia medsos melalui gawainya. Sudah jarang sekali membaca buku-buku baik pelajaran, komik, buku pengetahuan umum atau jenis buku apapun. Saya masih ingat kenangan masa

kecil, dimana bahan bacaan untuk anak ketika itu cukup mudah dijumpai dan marak, meski didominasi dari bahan bacaan impor. Namun setidaknya cukup mendorong minat baca pada anak-anak ketika itu.

Salah satu indikator keberhasilan dari suksesnya pendidikan yang terselenggara di Indonesia adalah dengan meningkatnya angka melek huruf pada warga Indonesia. Dilansir dari *kompasiana.com*, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang berhasil mengurangi angka buta huruf. Data UNDP tahun 2014 mencatat bahwa tingkat melek huruf masyarakat Indonesia mencapai 92,8% untuk kelompok dewasa, dan 98,8% untuk kategori remaja. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia telah melewati tahapan krisis literasi dalam pengertian kemelekhurufan. Meskipun demikian, tantangan yang saat ini dihadapi adalah rendahnya minat baca.

Selain ketersediaan buku di seluruh Indonesia belum memadai, pemerintah juga menghadapi rendahnya motivasi membaca di kalangan peserta didik. Hal ini memprihatinkan karena di era teknologi informasi, peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan membaca dalam pengertian memahami teks secara analitis, kritis dan reflektif. Sesungguhnya permasalahan umum dalam dunia literasi di Indonesia adalah rendahnya ikatan emosional terhadap sumber informasi salah satunya buku bacaan dan kegiatan pemanfaatan sumber informasi tersebut atau kegiatan membaca. Terkait dengan buku sebagai salah satu sumber informasi, rendahnya minat dan gairah membaca sebagian berakar dari masih kuatnya tradisi lisan dalam kehidupan sosial dan pola berpikir masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai "Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi

Sekolah di Desa Susukan Kabupaten Cirebon" untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan tersebut dan mengetahui faktor yang mendukung serta menghambat terlaksananya program. Penelitian ini juga dapat menjadi rekomendasi khususnya pada kebijakan Gerakan Literasi Masyarakat itu sendiri.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang serta identifikasi masalah yang telah dilakukan di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di Desa Susukan Kabupaten Cirebon?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di Desa Susukan Kabupaten Cirebon?

Tujuan

1. Dapat mendeskripsikan implementasi kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Desa Susukan Kabupaten Cirebon.
2. Dapat mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Gerakan Masyarakat di Desa Susukan Kabupaten Cirebon.

Pembahasan

Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *policy* diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana,

pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dalam suatu kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Terdapat banyak teori terkait implementasi kebijakan. Teori pertama adalah teori klasik, yakni teori yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Teori ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan public, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel: aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi; karakteristik dari agen pelaksana atau implementor, kondisi ekonomi, social dan politik, kecenderungan (*Disposition*) dari pelaksana atau implementor.

Teori kedua adalah teori yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Teori Mazmanian dan Sabatier disebut kerangka analisis implementasi (*A Framework for implementation Analysis*). Dalam teori ini dinyatakan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi yaitu karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan atau undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), dan variabel lingkungan (*non statutory variables affecting implementation*).

Syarat Implementasi Kebijakan

Putusan kebijakan dapat dilaksanakan dengan optimal jika memenuhi berbagai

persyaratan implementasi. Sabatier dan Mazmanian mengemukakan beberapa persyaratan dalam implementasi kebijakan adalah:

- a) Sasaran kebijakan harus memiliki derajat ketepatan dan kejelasan yang berlaku secara internal maupun dalam keseluruhan program yang dilaksanakan oleh para pelaksana atau agen pelaksana. Derajat ketepatan dan kejelasan tersebut harus dapat dipahami tidak hanya pihak internal tetapi termasuk pihak eksternal pengguna kebijakan. Dengan demikian seluruh pihak dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b) Sumber dana untuk melaksanakan kebijakan tersebut mencukupi. Sumber dana harus mencukupi baik keperluan gaji, staff, analisis teknis dalam pengembangan peraturan, administrasi perizinan, dan monitoring kebijakan.
- c) Sumber daya manusia atau agen pelaksana adalah orang-orang yang memberikan dukungan terhadap kebijakan serta memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan, dengan demikian tujuan dari putusan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Implementasi dilakukan dengan menunjuk orang-orang atau lembaga yang memiliki orientasi kebijakan yang sejalan dengan kebijakan tersebut.
- d) Perlu adanya koordinasi yang kuat antar berbagai agen atau lembaga implementor. Masyarakat harus menaruh kepercayaan kepada pemerintah pusat dan lembaga lokal dalam menyelesaikan rincian program. Sosialisasi dan sanksi perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan kepada seluruh masyarakat dan pelaksana.
- e) Perlu dukungan dari seluruh pihak baik internal maupun eksternal. Seluruh sub

unit harus dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan (Sudiyono, 2007: 93-97).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan terdiri dari aspek kebijakan, aspek sumber dana dan sumber daya, aspek koordinasi, dan aspek dukungan.

Faktor Keberhasilan yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pendidikan

Suatu implementasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Arif Rohman (2009: 147) menyatakan, bahwa ada 3 faktor yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak.
- Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-masing. Semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan.
- Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut

jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.

Oleh karenanya, disimpulkan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dari sebuah kebijakan. Melalui 2 pandangan ini, makakeberhasilan suatu implementasi kebijakan bergantung pada faktor yang ada pada rumusan kebijakan tersebut baik berupa teori yang mendukung serta dilindungi dengan konstitusi yang kuat, faktor pada tataran pelaksana kebijakan, dan faktor pada sistem pengorganisasian pelaksanaan kebijakan. Jika dikaitkan dengan teori Edward, maka dalam penelitian ini akan melihat faktor keberhasilan sebuah kebijakan berdasar pada 4 isu pokok yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Kebijakan akan efektif dilaksanakan apabila komunikasi yang dilakukan merata sampai pada tataran masyarakat paling bawah. Sehingga sosialisasi yang dilakukan agen pelaksana kebijakan harus tertuju kepada seluruh element yang terlibat dalam sebuah kebijakan.
- b) Sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut terpenuhi. Baik sumber daya manusia sebagai agen pelaksana, sampai sumber dana serta alokasi waktu khusus untuk melaksanakan kebijakan.
- c) Setiap agen pelaksana kebijakan mempunyai komitmen serta cakap untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
- d) Yang terakhir ialah berkenaan dengan struktur birokrasi dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan.

Pengertian Literasi

Literasi dalam bahasa Inggris bertuliskan literacy, kata ini berasal dari bahasa Latin littera (huruf) yang memiliki definisi melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang menyertainya. Berkenaan dengan ini Kern (2000) mendefinisikan istilah literasi secara komprehensif sebagai berikut:

“Literacy is the use of socially-, and historically-, and culturallysituated practices of creating and interpreting meaning through texts. It entails at least a tacit awareness of the relationships between textual conventions and their context of use and, ideally, the ability to reflect critically on those relationships. Because it is purpose-sensitive, literacy is dynamic – not static – and variable across and within discourse communities and cultures. It draws on a wide range of cognitive abilities, on knowledge of written and spoken language, on knowledge of genres, and on cultural knowledge.” (Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, dan historis, serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubunga-hubungan antara konvensi-konvensi tekstual dan konteks penggunaannya serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan itu. Karena peka dengan maksud/ tujuan, literasi itu bersifat dinamis – tidak statis – dan dapat bervariasi di antara dan di dalam komunitas dan kultur diskursus/ wacana. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre, dan pengetahuan kultural).

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa literasi memerlukan kemampuan

yang kompleks. Adapun pengetahuan tentang genre adalah pengetahuan tentang jenis-jenis teks yang berlaku/ digunakan dalam komunitas wacana misalnya, teks naratif, eksposisi, deskripsi dan lain-lain. Terdapat tujuh unsur yang membentuk definisi tersebut, yaitu berkenaan dengan interpretasi, kolaborasi, konvensi, pengetahuan kultural, pemecahan masalah, refleksi, dan penggunaan bahasa. Ketujuh hal tersebut merupakan prinsip-prinsip dari literasi. Menurut Kern (2000) terdapat tujuh prinsip pendidikan literasi, yaitu:

a) Literasi melibatkan interpretasi

Penulis/ pembicara dan pembaca/ pendengar berpartisipasi dalam tindak interpretasi, yakni: penulis/ pembicara menginterpretasikan dunia (peristiwa, pengalaman, gagasan, perasaan, dan lain-lain), dan pembaca/ pendengar kemudian menginterpretasikan. Interpretasi penulis/ pembicara dalam bentuk konsepsinya sendiri tentang dunia.

b) Literasi melibatkan kolaborasi

Terdapat kerjasama antara dua pihak yakni penulis/ pembicara dan pembaca/ pendengar. Kerjasama yang dimaksud itu dalam upaya mencapai suatu pemahaman bersama. Penulis/ pembicara memutuskan apa yang harus ditulis/ dikatakan atau yang tidak perlu ditulis/ dikatakan berdasarkan pemahaman mereka terhadap pembaca/ pendengarnya. Sementara pembaca/ pendengar mencurahkan motivasi, pengetahuan, dan pengalaman mereka agar dapat membuat teks penulis bermakna.

c) Literasi melibatkan konvensi

Orang-orang membaca dan menulis atau menyimak dan berbicara itu ditentukan oleh konvensi/ kesepakatan kultural (tidak universal) yang berkembang melalui penggunaan dan dimodifikasi untuk tujuan-tujuan individual. Konvensi disini mencakup aturan aturan bahasa baik lisan maupun tertulis.

d) Literasi melibatkan pengetahuan kultural.

Membaca dan menulis atau menyimak dan berbicara berfungsi dalam sistem-sistem sikap, keyakinan, kebiasaan, cita-cita, dan nilai tertentu. Sehingga orang-orang yang berada di luar suatu sistem budaya itu rentan beresiko salah dipahami oleh orang-orang yang berada dalam system budaya tersebut.

e) Literasi melibatkan pemecahan masalah.

Karena kata-kata selalu melekat pada konteks linguistik dan situasi yang melingkupinya, maka tindak menyimak, berbicara, membaca, dan menulis itu melibatkan upaya membayangkan hubungan-hubungan di antara kata-kata, frase-frase, kalimat-kalimat, unit-unit makna, teks-teks, dan duniadunia. Upaya membayangkan/ memikirkan/ mempertimbangkan ini merupakan suatu bentuk pemecahan masalah.

f) Literasi melibatkan refleksi dan refleksi diri.

Pembaca/ pendengar dan penulis/ pembicara memikirkan bahasa dan hubungan-hubungannya dengan dunia dan diri mereka sendiri. Setelah mereka berada dalam situasi komunikasi mereka memikirkan apa yang telah mereka katakan, bagaimana mengatakannya, dan mengapa mengatakan hal tersebut.

g) Literasi melibatkan penggunaan bahasa.

Literasi tidaklah sebatas pada sistem-sistem bahasa (lisan/ tertulis) melainkan mensyaratkan pengetahuan tentang bagaimana bahasa itu digunakan baik dalam konteks lisan maupun tertulis untuk menciptakan sebuah wacana/ diskursus. Dari poin diatas maka prinsip pendidikan literasi adalah literasi melibatkan interpretasi, kolaborasi, konversi, pengetahuan kultural, pemecahan masalah, refleksi diri, dan melibatkan penggunaan bahasa.

Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Berdasarkan buku panduan yang dibuat oleh Kemendikbud terkait kebijakan ini, GLS memiliki:

a. Landasan Filosofis

Sumpah pemuda butir ketiga (3) menyatakan, “menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia yang memiliki makna pengakuan terhadap keberadaan ratusan bahasa daerah yang memiliki hak hidup dan peluang penggunaan bahasa asing sesuai dengan kebutuhannya.”

1. Butir ini menegaskan pentingnya pembelajaran berbahasa dalam pendidikan nasional.
2. Konvensi PBB tentang Hak Anak pada tahun 1989 tentang pentingnya penggunaan bahasa ibu. Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa, khususnya mikrokultur mikrokultur tertentu perlu difasilitasi dengan bahasa ibu saat mereka memasuki pendidikan dasar kelas rendah (kelas I, II, III).
3. Konvensi PBB di Praha tahun 2003 tentang kecakapan literasi dasar dan kecakapan perpustakaan yang efektif merupakan kunci bagi masyarakat yang literat dalam menghadapi derasnya arus informasi teknologi. Lima komponen yang esensial dari literasi informasi itu adalah *basic literacy*, *library literacy*, *media literacy*, *technology literacy*, dan *visual literacy*.

b. Landasan Hukum

Landasan hukum dari Gerakan Literasi Sekolah yang tertuang dalam desain induk GLS ialah:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31, Ayat 2: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.”
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- c. Tujuan
- GLS mempunyai tujuan umum dan khusus, berikut ini adalah tujuan dari Gerakan Literasi Sekolah:
1. Tujuan Umum

Menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.
 2. Tujuan Khusus
 - a) Menumbuhkembangkan budaya literasi di Sekolah.
 - b) Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat.
 - c) Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan.
 - d) Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca.
 - d. Ruang Lingkup

Ruang lingkup GLS berupa:

 1. Lingkungan fisik sekolah (fasilitas dan sarana prasarana literasi).
 2. Lingkungan sosial dan afektif (dukungan dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah).
 3. Lingkungan akademik (program literasi yang menumbuhkan minat baca dan menunjang kegiatan pembelajaran di SD).
 - e. Sasaran dari GLS ini adalah pendidik, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan di SD.
 - f. Target Pencapaian

GLS di SD menciptakan ekosistem pendidikan di SD yang literat. Ekosistem pendidikan yang literat adalah lingkungan yang:

 1. Menyenangkan dan ramah peserta didik, sehingga menumbuhkan semangat warganya dalam belajar.
 2. Semua warganya menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama.
 3. Menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan
 4. Memampukan warganya cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sosialnya.
 5. Mengakomodasi partisipasi seluruh warga sekolah dan lingkungan eksternal SD

Prinsip-prinsip Literasi Sekolah

Menurut Beers (2009), praktik yang baik dalam gerakan literasi sekolah menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi. Tahap perkembangan anak dalam belajar membaca dan menulis saling beririsan antartahap perkembangan. Memahami tahap perkembangan literasi peserta didik dapat membantu sekolah untuk memilih strategi pembiasaan dan pembelajaran literasi yang tepat sesuai kebutuhan perkembangan mereka.
- b. Program literasi yang baik bersifat berimbang. Sekolah yang menerapkan program literasi berimbang menyadari bahwa tiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, strategi membaca dan jenis teks yang dibaca perlu divariasikan dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Program literasi yang bermakna dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan bacaan kaya ragam teks, seperti karya sastra untuk anak dan remaja.
- c. Program literasi terintegrasi dengan kurikulum. Pembiasaan dan pembelajaran literasi di sekolah adalah tanggung jawab semua guru di semua mata pelajaran sebab pembelajaran mata pelajaran apapun membutuhkan bahasa, terutama membaca dan menulis. Dengan demikian, pengembangan profesional guru dalam hal literasi perlu diberikan kepada guru semua mata pelajaran.
- d. Kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun. Misalnya dengan menulis surat kepada presiden atau membaca untuk ibu merupakan contoh-contoh kegiatan literasi yang bermakna.
- e. Kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan. Kelas berbasis literasi yang kuat diharapkan memunculkan berbagai

kegiatan lisan berupa diskusi tentang buku selama pembelajaran di kelas. Kegiatan diskusi ini juga perlu membuka kemungkinan untuk perbedaan pendapat untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya, saling mendengarkan, dan menghormati perbedaan pandangan.

- f. Kegiatan literasi perlu mengembangkan kesadaran terhadap keberagaman. Warga sekolah perlu menghargai perbedaan melalui kegiatan literasi di sekolah. Bahan bacaan untuk peserta didik perlu merefleksikan kekayaan budaya Indonesia agar mereka dapat terpancain pada pengalaman multikultural.

Strategi Membangun Budaya Literasi Sekolah

Agar sekolah mampu menjadi garis depan dalam pengembangan budaya literasi, Beers, dkk. (2009) dalam buku *A Principal's Guide to Literacy Instruction*, menyampaikan beberapa strategi untuk menciptakan budaya literasi yang positif di sekolah, yaitu:

- a. Mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi

Lingkungan fisik adalah hal pertama yang dilihat dan dirasakan warga sekolah. Oleh karena itu, lingkungan fisik perlu terlihat ramah dan kondusif untuk pembelajaran. Sekolah yang mendukung pengembangan budaya literasi sebaiknya memajang karya peserta didik dipajang diseluruh area sekolah termasuk koridor, kantor kepala sekolah dan guru. Selain itu, karya-karya peserta didik diganti secara rutin untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik. Selain itu, peserta didik dapat mengakses buku dan bahan bacaan lain di sudut baca disemua kelas, kantor, dan area lain di sekolah. Ruang pimpinan dengan pajangan karya peserta didik akan memberikankan kesan positif

tentang komitmen sekolah terhadap pengembangan budaya literasi.

b. Mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat.

Lingkungan sosial dan afektif dibangun melalui model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Hal itu dapat dikembangkan dengan pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Pemberian penghargaan dapat dilakukan saat upacara bendera setiap minggu untuk menghargai kemajuan peserta didik disemua aspek. Prestasi yang dihargai bukan hanya akademik, tetapi juga sikap dan upaya peserta didik. Dengan demikian, setiap peserta didik mempunyai kesempatan untuk memperoleh penghargaan sekolah. Selain itu, literasi diharapkan dapat mewarnai semua perayaan penting disepanjang tahun pelajaran. Ini bisa direalisasikan dalam bentuk fesival buku, lomba poster, mendongeng, karnaval tokoh buku cerita, dan sebagainya. Pimpinan sekolah selayaknya berperan aktif dalam menggerakkan literasi, antara lain dengan membangun budaya kolaboratif antarguru dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, setiap orang dapat terlibat sesuai kepakaran masing-masing. Peran orangtua sebagai relawan gerakan literasi akan semakin memperkuat komitmen sekolah dalam pengembangan budaya literasi.

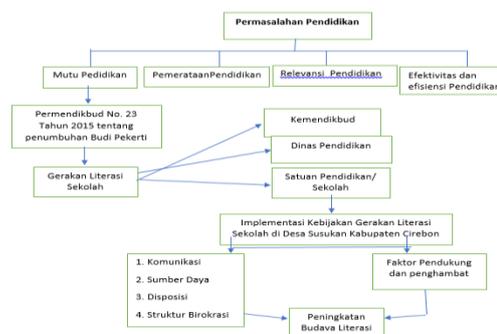
c. Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat

Lingkungan fisik, sosial, dan afektif berkaitan erat dengan lingkungan akademik. Ini dapat dilihat dari perencanaan dan pelaksanaan gerakan literasi di sekolah. Sekolah sebaiknya memberikan alokasi waktu yang cukup banyak untuk pembelajaran literasi. Salah satunya dengan menjalankan kegiatan membaca dalam hati dan guru membacakan buku dengan nyaring selama 15 menit sebelum pelajaran

berlangsung. Untuk menunjang kemampuan guru dan staf, mereka perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan tenaga kependidikan untuk peningkatan pemahaman tentang program literasi, pelaksanaan dan keterlaksanaannya.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir dari penelitian ini diawali dengan adanya 4 permasalahan mendasar pada pendidikan. Rendahnya budaya literasi siswa sekolah mendasar merupakan permasalahan terkait mutu pendidikan di Indonesia. Pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengeluarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang kemudian diturunkan dengan kebijakan Gerakan Literasi Sekolah sebagai upaya untuk menumbuhkan budaya literasi pada anak. Dalam implementasinya, banyak faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat kebijakan ini diimplementasikan. Penelitian ini akan melihat bagaimana proses dari kebijakan ini dilakukan dengan melihat 4 pokok bahasan yaitu: komunikasi, sumber daya, komitmen dan struktur birokrasi dari pelaksana kebijakan tersebut.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Metodologi Penelitian

Desain penelitian

Terkait dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Suharsimi (2005: 234) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Bogdan dan Taylor (1975) dalam Lexy J. Moleong (2005: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi di lapangan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan sebuah fenomena dimana peneliti melakukan penelitian. Dengan demikian penelitian ini akan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Desa Susukan Kabupaten Cirebon. Dari hasil penelitian tersebut akan diperoleh data mengenai Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di Desa Susukan Kabupaten Cirebon.

Setting Penelitian

Setting dalam penelitian ini adalah di siswa sekolah dasar di Desa Susukan Kabupaten Cirebon. Peneliti akan fokus pada siswa sekolah dasar kelas 1,2, dan 3 di Sekolah Dasar Negeri 1 Desa Susukan. Penelitian ini akan dilaksanakan bulan Juli 2017 hingga November 2017. Penentuan waktu mempertimbangkan fokus penelitian dan kemampuan peneliti dalam menginterpretasikan sebuah fenomena. Dengan penjabaran proses penelitian yang diawali dari koordinasi dengan pihak sekolah baik kepala sekolah, guru, dan warga sekolah yang lain. Dilanjutkan dengan melakukan tahap observasi pertama, observasi kedua, dan seterusnya kemudian

diakhiri dengan pemeriksaan hasil penelitian.

Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi subyek penelitian adalah warga masyarakat yang berada di Desa Susukan yang meliputi kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat biasa. Sedangkan obyeknya adalah situasi sosial dan interaksi sosial yang menggambarkan implementasi Gerakan Literasi Sekolah di Desa Susukan Kabupaten Cirebon.

Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data-data dilapangan peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang biasa disebut dengan triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada (Sugiyono, 2007: 194). Teknik pengumpulan data berupa:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan semistruktur, yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya, dan ide-idenya. Wawancara akan dilakukan pada sebagian anggota di sekolah seperti kepala sekolah, kepala perpustakaan, dan subjek penelitian lainnya untuk menggali informasi terkait implementasi gerakan literasi di sekolah. Peneliti akan mewawancarai kepala sekolah tentang implementasi gerakan giterasi di sekolah. Peneliti juga akan mewawancarai kepala perpustakaan dan guru untuk menggali informasi peran mereka dalam pengimplemtasian kebijakan tersebut.

2. Observasi

Observasi akan dilakukan untuk mengamati implementasi gerakan literasi yang berkembang di sekolah, artefak yang mendukung, maupun tentang program-program yang menunjang.

Peneliti menggunakan observasi partisipatif aktif yaitu observasi yang diikuti oleh peneliti sesuai apa yang dilakukan oleh narasumber tetapi belum sepenuhnya lengkap.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan untuk memperkuat data mengenai implementasi gerakan literasi di sekolah. Dokumentasi ini berupa dokumen, foto, video, dan data-data yang ada di sekolah. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai suatu bukti data yang mendukung pengamatan peneliti dilapangan.

Instrumen Penelitian

Instrumen dari penelitian kualitatif adalah si peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument memiliki fungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari temuannya (Sugiyono, 2013). Namun peneliti juga harus menggunakan pedoman dalam mengumpulkan sebuah data. Baik itu pedoman wawancara maupun pedoman studi dokumen yang membantu peneliti dalam mengumpulkan data dilapangan. Berikut ini kisi-kisi yang dibuat oleh peneliti:

Tabel 6. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No.	Aspek yang Diteliti	Teknik
1	Implementasi Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukman Al Hakim Internasional a. Program	Studi dokumentasi dan wawancara

	berdasarkan putusan kebijakan b. Sosialisasi Kebijakan c. Sumber daya manusia yang terlibat d. Alokasi anggaran dan waktu dalam pelaksanaan kebijakan e. Komitmen dari agen pelaksana f. Struktur Birokrasi	
2	Faktor pendukung dan penghambat implementasi Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukman Al Hakim Internasional a. Faktor pendukung implementasi Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukman Al Hakim Internasional b. Faktor penghambat implementasi Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukman Al Hakim Internasional	wawancara

Teknik Analisis Data

Data penelitian dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan model kualitatif dari Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007: 337) sebagaimana lazim digunakan adalah:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) Peneliti memilih data yang relevan, penting dan bermakna, dan data yang tidak berguna, untuk menjelaskan apa yang menjadi sasaran analisis. Lalu menyederhanakan dengan membuat fokus, klasifikasi, dan abstraksi data.
2. Sajian Deskripsi Data (*Data Display*) Menyajikan data secara deskriptif tentang apa yang ditemukan dalam analisis. Sajian deskriptif dapat diwujudkan dalam narasi. Alur sajiannya sistematis.

3. Penyimpulan/ Penarikan Kesimpulan (*Conclusion/Verification*) Penarikan kesimpulan atas apa yang disajikan merupakan intisari dari analisis yang memberikan pernyataan.

Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan sebuah data, diperlukan teknik dalam pemeriksaan yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Lexy J. Moleong (2005: 330) ada 4 kriteria yang dapat digunakan untuk menetapkan keabsahan data: 1) Kredibilitas, 2) Transferabilitas, 3) Dependabilitas, 4) Confirmabilitas. Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dalam menguji kredibilitas data. Lexy J. Moleong juga menjelaskan triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode dan sumber data. Triangulasi metode menekankan penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda pada sumber data yang sama untuk menguji kemantapannya. Cara yang dilakukan dapat dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta studi dokumentasi yang dilakukan. Sedangkan triangulasi sumber menekankan penggunaan metode yang sama pada sumber yang berbeda. Cara yang dilakukan untuk memastikan keabsahan data dengan triangulasi sumber adalah menggunakan teknik wawancara dengan tema yang sama pada sumber yang berbeda.

Hasil Penelitian

Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar Islam Yakpi

Berdasarkan program-program yang telah disampaikan di atas, berikut ini adalah gambaran implementasi kebijakan gerakan literasi sekolah dilihat dari teori Edward III yang mementingkan 4 isu pokok, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi berkaitan dengan sosialisasi tentang kebijakan kepada organisasi dan/atau publik serta para agen pelaksana yang terlibat. Komunikasi dalam implementasi kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SDI YAKPI dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Sosialisasi dilakukan melalui rapat kerja, rapat manajemen, dan surat pemberitahuan kepada orangtua. Selain melalui sarana itu, setiap minggu ketika upacara bendera juga selalu diingatkan terkait program-program dan beberapa tagihan guru. Hal ini disampaikan oleh FY: “saya juga suka mengingatkan ketika upacara bendera. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan dulu ucapan penghargaan dan terima kasih kepada guru-guru yang sudah membantu berjalannya program dan mengingatkan program apa yang harus dilaksanakan pada minggu ini”. (FY/11/1/2017) Untuk program-program penunjang literasi yang diinisiasi oleh perpustakaan, penyebaran informasinya bersifat internal karena program-program lebih banyak diperuntukkan dan melibatkan internal sekolah walaupun ada beberapa program yang melibatkan orangtua siswa. Dalam hal ini orangtua siswa masih menjadi bagian dari internal sekolah. Hal ini disampaikan oleh RI bahwa alur sosialisasi program perpustakaan sebagai berikut: “Pertama-tama diforum guru-guru lalu dibuatkan surat kepada orangtua. Dan surat pemberitahuan itu akan diberikan kepada wali siswa untuk nantinya wali siswa dapat memberikan informasi kepada orangtua. Selain itu, sebagai bentuk publikasi aktivitas apa saja yang sudah dilakukan,

foto-foto kegiatan akan dimuat di kalender perpustakaan dan website sekolah serta website perpustakaan. Kalau untuk warga sekolah biasanya disampaikan melalui grup whatsapp sekolah yang berisi guru-guru dan karyawan. Dan di grup itu akan diposting poster kegiatan yang akan diselenggarakan”. (RI/17/1/2017)

Peneliti juga mewawancarai MT selaku guru kelas sekaligus menjadi Kadiv. Akademik dan Kurikulum. Berikut ini jawaban beliau ketika ditanyai terkait sosialisasi kebijakan terkait literasi sekolah: “kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung dari sekolah, tentu guru-guru akan selalu menjadi target utama apalagi tentang literasi. Karna kan kami juga yang akhirnya harus mem breakdown program itu ke adik-adik. Kalau untuk program dari perpustakaan biasanya guru-guru diingatkan di whatsapp. Atau pemberitahuan langsung dari ustadzah Rima biasanya”. (MT/11/1/2017)

Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program dilakukan melalui rapat kerja, rapat manajemen, surat pemberitahuan kepada orangtua, website sekolah, penyebaran poster, dan melalui postingan poster via media sosial berupa whatsapp. Hal ini dilakukan agar sebuah program mendapat dukungan melalui penyebaran informasi dari agen pelaksana kebijakan.

b. Sumber Daya

Aspek ini berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk pelaksanaan program agar dapat berjalan dengan baik. Sumber daya tersebut meliputi:

1. Sumber daya manusia

Diperlukannya sumber daya manusia untuk mendukung berjalannya sebuah kebijakan. Sumber daya manusia atau agen pelaksana adalah orang-orang yang memberikan dukungan terhadap kebijakan serta memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan gerakan literasi sekolah di SDI Yakpi juga diperlukan agen-agen pelaksana yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa seluruh elemen sekolah

menjadi agen pelaksana kebijakan GLS ini. Hal ini juga disampaikan oleh FY ketika diwawancarai terkait sumber daya yang terlibat untuk kebijakan GLS:

“Manajemen terbuka terhadap masukan-masukan. Dari pihak manajemen nanti disampaikan ke guru-guru sehingga kebijakan atau program tidak hanya berasal dari kepala sekolah. Orangtua juga dilibatkan. Dalam proses ini Kita berkolaborasi dengan seluruh guru dan karyawan. Semuanya dilibatkan. Sehingga tujuan semuanya tercapai jika melibatkan seluruh warga sekolah”. (FY/11/1/2017) Pendapat ini diperkuat oleh apa yang disampaikan RI kepada peneliti bahwa: “Semuanya dilibatkan ust, baik kepala sekolah sebagai stakeholder, siswa pasti, guru sebagai subjek, karyawan, dan pihak perpustakaan sebagai penanggungjawab dan fasilitator”. (RI/17/1/2017) Serupa apa yang disampaikan oleh MT: “Sumber daya manusianya ya kita-kita semua ini ust. Misalnya kegiatan reading book itu kan jelas dihandle langsung oleh guru-guru kelas masing-masing, morning motivasi juga begitu. Terus kalau ada lomba-lomba dari perpustakaan juga yang jadi juri atau menyeleksi karyanya itu juga guru-guru dari kelas”. (MT/11/2017) Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang terlibat untuk mendukung kebijakan GLS ini adalah seluruh warga sekolah baik kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, dan orangtua siswa. Dengan adanya dukungan serta komitmen dari agen pelaksana ini, maka tidak ada alasan kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik.

2. Sumber dana

Didapat hasil bahwa secara khusus memang tidak dialokasikan anggaran untuk kebijakan Gerakan Literasi Sekolah, tapi sekolah menyiapkan alokasi dana untuk program-program yang menunjang budaya literasi. Seperti apa yang disampaikan oleh FY bahwa: “Secara khusus untuk GLS memang tidak ada, tapi lebih kepada program-program yang menunjang hal tersebut. dari program-program ini berbasis divisi. Alokasi yang diberikan pun based on divisi. Untuk pengadaan buku sudah ada

alokasi dananya sendiri, untuk perputakaan pun seperti itu”. (FY/11/1/2017)

Data ini juga diperkuat oleh apa yang disampaikan oleh RI.

Bahkan RI menjabarkan secara rinci sebagai berikut: “Setiap tahun ajaran baru, 1 orang siswa dibebankan biaya Rp. 100.000,00 untuk keperluan perpustakaan. Selain itu, setiap tahunnya juga perpustakaan mendapat anggaran tersendiri untuk sirkulasi dan kegiatan-kegiatan ringan lainnya. Tapi untuk buku, sekolah sudah mempunyai alokasi khusus menggunakan dana BOS dari pemerintah untuk pengadaan buku. Selain itu, untuk program-program besar juga kita biasa mengajukan proposal kegiatan kepada orangtua siswa yang memang memiliki unit usaha”. (RI/17/1/2017)

Kesimpulan yang dapat diambil adalah pihak sekolah mengalokasikan dana sesuai dengan programnya masing-masing. Baik itu program yang bersifat kegiatan maupun penyediaan sumber informasi literasi.

3. Alokasi Waktu

Dari hasil wawancara yang dilakukan dan penelitian di lapangan didapat bahwa SDI mengalokasikan waktu khusus untuk program-program yang menunjang kebijakan GLS ini. Karena peningkatan literasi siswa merupakan tujuan yang diinginkan oleh sekolah. Hal ini diperkuat oleh apa yang disampaikan oleh FY: “kita punya alokasi-alokasi khusus untuk program-program yang menunjang literasi”. (FY/11/1/2017)

Program yang menunjang literasi juga terintegrasi dari kurikulum sekolah, hal ini diinformasikan MT kepada peneliti: “untuk beberapa program memang langsung turunan dari kurikulum sekolah. Misalnya reading group itu masuk kedalam pembelajaran bahasa. Terus morning motivation juga masuk kedalam jadwal tetap setiap pagi untuk seluruh siswa”. (MT/11/1/2017) Karena program-program yang menunjang kebijakan GLS ini sangat banyak, maka pihak sekolah dan perpustakaan pun membuat matriks kerja dan matriks program agar tidak terjadi benturan program diwaktu tertentu. Ini juga

disampaikan oleh RI selaku kepala perpustakaan ADIBA yang lebih banyak membuat program pendukung kebijakan GLS:

“Tentu kita sudah mengalokasikan waktu untuk program-program tersebut. Dibuatkan matriks juga supaya kita bisa ingat terus dibulan ini harus berjalan program apa dan seterusnya. Dan kita sesuaikan dengan program-program kelas”. (RI/17/1/2017)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah sudah mengalokasikan waktu khusus sebagai upaya untuk peningkatan literasi siswa. Berikut ini adalah gambar matriks program perpustakaan yang dapat memperkuat data hasil wawancara:

c. Disposisi

Komitmen dari agen-agen memiliki pengaruh yang kuat dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Berikut ini gambaran komitmen agen pelaksana berdasarkan FY: “Mereka sangat berkomitmen. Karena memang itu ruhnya. itu sudah menjadi kebutuhan. Ya umumnya kita rekrut fresh gradute itu karena masih bisa di instal pemikirannya, karena virus-virusnya belum terlalu banyak. Idealismenya masih tinggi dan masih mau diajak untuk mencari hal-hal yang baru. Saya juga menuntut para guru untuk belajar. Walaupun semuanya tidak mempunyai basic yang sesuai dengan program ini. Secara pribadi kita dituntut untuk melakukan improvisasi”. (FY/11/1/2017) dan yang disampaikan oleh RI: “Semua berkomitmen dan guru-guru yang bersangkutan ikut terlibat aktif dalam program yang dibuat. Masalah kemampuan, saya juga sering dapet pelatihan dan bimtek (bimbingan teknis) tentang kepustakaan. Jadi gak ada alasan kalau gak berkopeten untuk ngurusin perpustakaan”. (RI/17/1/2017) 3Pernyataan tersebut diperkuat oleh MT, bahwa:

“Saya selaku kadiv akademik dan kurikulum biasanya suka memberikan orientasi dulu tentang suatu program. Supaya guru-guru paham seberapa urgent program ini untuk diterapkan ke anak-anak. Kalau terkait kemampuan manajerial, ya kita sering juga dapet pelatihan-pelatihan,

diminta ikut seminar tertentu, dan ad juga yang diberi beasiswa dari sekolah”. (MT/11/1/2017) Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan bahwa seluruh warga turut aktif mengimplementasikan kebijakan tersebut. Untuk kemampuan manajerial, pihak sekolah memfasilitasi para guru untuk terlibat dalam seminar, pelatihan, bimbingan teknis dan melanjutkan studi agar tidak gagap merespon kebijakan yang telah ditetapkan.

d. Struktur Birokrasi

Kebijakan GLS ini dikendali secara langsung oleh kepala sekolah. Artinya yayasan tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut. seperti apa yang disampaikan oleh FY:

“Alurnya dari rapat manajemen kemudian akan dibawa ke forum besar seperti rapat kerja yang mengundang seluruh warga sekolah kemudian memberikan pemberitahuan kepada orangtua. Terkadang, untuk program tertentu kami melibatkan orangtua dan mengundang orangtua untuk mendapatkan bimbingan teknis secara langsung agar sekolah dan orangtua samasama bersinergis dalam pelaksanaan suatu program”. (FY/11/1/2017) Sedangkan untuk program-program yang disusun oleh perpustakaan, RI menyampaikan sebagai berikut:

“Untuk program-program perpustakaan dirancang tentunya didalam internal pengurus perpustakaan itu terlebih dahulu, kemudian ketika konsepnya sudah matang, saya selaku kepala perpustakaan akan berbicara dengan kepala sekolah. Jika program disetujui oleh kepala sekolah, maka nantinya akan dibuatkan surat pemberitahuan kepada guru dan karyawan agar ikut membantu pelaksanaan program tersebut. kurang lebih seperti itu struktur birokrasinya”. (RI/17/1/2017) Disimpulkan bahwa garis struktur birokrasi kebijakan terkait literasi sekolah adalah dari pihak manajemen akan menyampaikan program yang diusulkan untuk kemudian disetujui oleh kepala sekolah. Program yang sudah disetujui kemudian disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait agar diberikan

arahan dan SOP (Standar Operational Procedure) dari program yang akan dilaksanakan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Program yang menunjang kebijakan gerakan literasi di SDI YAKPI adalah sebagai berikut:

- 1) *Reading Group*;
- 2) *Morning Motivation*;
- 3) *Mini library*;
- 4) Pengadaan perpustakaan;
- 5) *Best Reader of The Month*,
- 6) *Books Lover*;
- 7) Oktober bulan bahasa;
- 8) *World book day*;
- 9) Waqaf buku;
- 10) *Story Telling*;
- 11) Mading;
- 12) *Library Class*.

2. Pelaksanaan kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SDI YAKPI ialah sebagai berikut:

1) Komunikasi

Sosialisasi program dilakukan melalui rapat kerja, rapat manajemen, surat pemberitahuan kepada orangtua, website sekolah, penyebaran poster, dan melalui postingan poster via media sosial berupa whatsapp.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlibat untuk mendukung kebijakan GLS ini adalah seluruh warga sekolah baik kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, dan orangtua siswa.

b. Sumber Dana

Pihak sekolah mengalokasikan dana sesuai dengan programnya masing-masing. Baik itu program yang bersifat kegiatan maupun penyediaan sumber informasi literasi. Alokasi dana berasal dari BOS (Bantuan Oprasional Sekolah), Sumbangan dari orangtua, dan pihak sponsor.

c. Alokasi Waktu

Pihak sekolah sudah mengalokasikan waktu khusus sebagai upaya untuk peningkatan literasi siswa dengan

mengintegrasikan kedalam kurikulum, dan terdapat bulan tertentu sebagai bulan bahasa.

2) Disposisi

Agen-agen yang terlibat sangat berkomitmen dengan program yang dibuat. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan bahwa seluruh warga turut aktif mengimplementasikan kebijakan tersebut. Selain itu, dalam proses menyeleksi guru dan karyawan dilakukan tes dan wawancara untuk mengetahui dan menumbuhkan komitmen seluruh warga sekolah.

3) Struktur Birokrasi

Garis struktur birokrasi kebijakan terkait literasi sekolah adalah dari pihak manajemen akan menyampaikan program yang diusulkan untuk kemudian disetujui oleh kepala sekolah. Program yang sudah disetujui kemudian disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait agar diberikan arahan dan SOP (*Standar Operational Procedure*) dari program yang akan dilaksanakan.

4) Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SDI YAKPI:

- a. Adanya sarana untuk mensosialisasikan kebijakan atau program dari sekolah.
- b. Perkembangan media juga sangat membantu.
- c. Adanya hibah buku atau wakaf buku dari orangtua.
- d. Selain itu sekolah juga mengalokasikan waktu dan dana.
- e. Guru-guru mempunyai semangat belajar yang baik.
- f. Adanya alokasi dana untuk membuat poster, surat edaran, dan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
- g. Selain itu, adanya mahasiswa PPL juga membantu dalam pelaksanaan program-program perpustakaan.
- h. Semua warga sekolah terlibat aktif dalam implementasi program yang dibuat oleh perpustakaan.

5) Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SDI YAKPI:

- a. Buku yang kaya akan nilai-nilai serta gambar-gambar menarik sulit didapatkan di Indonesia.
- b. Terkadang surat tidak sampai ke orangtua karena anak-anak lupa menyampaikan surat edaran yang dititipkan pihak sekolah kepada siswa.
- c. Kesibukkan masing-masing guru yang biasa menjadikan proses pembuatan surat atau poster yang mendadak karena keterbatasan sumber daya manusia.
- d. Program terlalu monoton.
- e. Setiap guru memiliki tugas utamanya masing-masing sehingga guru-guru tentunya lebih memprioritaskan tugas tersebut.
- f. Belum adanya evaluasi dari berbagai program.

Daftar Pustaka

- Amiruddin Mahmud. 2016. Membangun Budaya Literasi. Diakses dari: http://www.kompasiana.com/amirudinmahmud/membangunbudayaliterasi_570261c7a623bd58094c29f9. Pada tanggal 21 November 2016.
- Arif Rohman. 2014. Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Beers, C. S. 2009. A Principal's Guide to Literacy Instruction. New York: Guilford Press.
- Daniel Fifaldo. 2015. Filsafat Pendidikan dalam Pendidikan Karakter. Diakses dari: www.academia.edu. Pada tanggal 21 November 2016.
- Joko Widodo. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Jatim: Bayumedia Publishing.
- Kemendikbud. 2016. Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan

- Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- _____. 2016. Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemendikbud. (2016). Survey Internasional PIRLS. Diakses dari :<http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/survei-internasional-pirls>. Pada tanggal 6 Maret.
- Moleong, Lexy J. 1995. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Nanang Fattah. 2012. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosda karya.
- Nurul Sofa. 2010. Penerapan Literasi Informasi di Sekolah Alam Indonesia Rawa Kopi. Skripsi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- Redaktur Media. 2015. Literasi Indonesia Sangat Rendah. Diakses dari: <http://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/14/12/15/ngm3g840literasi-indonesia-sangat-rendah>. pada tanggal 21 November 2016.
- Riant Nugroho. 2007. Kebijakan Pendidikan yang Unggul. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Solichin Abdul Wahab. (2014). Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudiyono. 2007. Buku Ajar: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: UNY.
- Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, HAR & Riant Nugroho. 2009. Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____. 2008. Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- UNESCO. 2003. The Prague Declaration. "Towards an Information Literate Society". Diakses dari: www.unesco.com. Pada tanggal 6 Maret 2017.
- Yosal Iriantara & Usep Syaripudin, M.Ed. 2013. Komunikasi Pendidikan. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Yoyon Bahtiar Irianto. 2012. Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.